

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Tugas)

Oleh :

Tammia (2216041104)



ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

Abstract

By

Tammia

Bandar Lampung City as one of the cities in Indonesia that is growing rapidly, Facing challenges in managing waste that continues to increase. Policy Waste management that has been implemented by the city government is considered not optimal. The phenomenon that becomes a problem is the process of policy implementation by The government in household waste management is still low. This study aims to analyze the implementation of home waste management policies stairs in Bandar Lampung City and identify supporting factors and constraints faced in the implementation process according to the policies regulated in Regional Regulation No.5 of 2015. Methods used qualitative approach with data collection techniques through literature studies. The research site used is Bandar Lampung City. Research results using George Edward III's implementation model includes Communication, Resources, commitment, bureaucratic structure, showing that policy waste management in Bandar Lampung City has not been optimal in overcoming the problem waste, the level of waste management is still low and there is still a lot of waste not managed properly, especially the problem of household waste.

Keyword : *Policy Implementation, Waste Management, Regional Regulations, Waste Household*

Abstrak

Oleh

Tammia

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota di Indonesia yang berkembang pesat, menghadapi tantangan dalam mengelola sampah yang terus meningkat. Kebijakan pengelolaan sampah yang telah diterapkan oleh pemerintah kota dinilai belum optimal. Fenomena yang menjadi permasalahan adalah proses implementasi kebijakan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung dan mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya sesuai kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2015. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Tempat penelitian yang digunakan adalah Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menggunakan model implementasi George Edward III meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Komitmen, Struktur Birokrasi, menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung belum optimal dalam mengatasi masalah sampah, tingkat pengelolaan sampah masih rendah dan masih banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik terutama masalah sampah rumah tangga.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Sampah Rumah Tangga

KATA PENGANTAR

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyusun penelitian yang berjudul " Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Bandar Lampung" ini dengan baik.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam pembuatan penelitian ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik.

Selain itu, peneliti berterimakasih kepada orang tua, kepada sahabat-sahabat nafas berdetak, dan teman-teman. Yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Selamat membaca!

Bandar Lampung, Oktober 2023

Tammia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PEMBAHASAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan	13
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan	14
2.2.3 Model Implementasi Kebijakan	15
A. Model Van Meter & Van Horn.....	15
B. Model Nakamura & Smallwood.....	18
C. Model George Edward III.....	19
2.3 Tinjauan Tentang Sampah Rumah Tangga	21
2.4 Tinjauan Tentang Pengelolaan 3R (<i>Reuse,Reduce,Recycle</i>).....	22
2.5 Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian	26

3.3 Lokasi Penelitian.....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Teknik Analisis Data.....	29
3.6.1 Reduksi Data	29
3.6.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	30
3.6.3 Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing</i>)	30
3.7 Teknik Keabsahan Data	31
3.7.1 Kredibilitas Data (<i>Credibility</i>)	31
3.7.2 Teknik Pengujian Keteralihan Data (<i>Transferability</i>).....	32
3.7.3 Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (<i>Dependability</i>)	32
3.7.4 Teknik Kepastian Data (<i>Confirmability</i>).....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	33
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung..	34
4.1.3 Gambaran Umum Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Lampung	37
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	38
4.2.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Bandar Lampung.....	38
A. Komunikasi.....	41
B. Sumberdaya	42
C. Komitmen Pemerintah (Disposisi)	42
4.2.2 Faktor Pendukung dan Kendala Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Bandar Lampung.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	48

DAFTAR PUSTAKA	52
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Capaian Pengelolaan Sampah Di Indonesia.....	5
Gambar 1. 2 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber dan Jenis Sampah	6
Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn ..	18
Gambar 2. 2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III	20

BAB I PEMBAHASAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik adalah sebuah langkah awal pemerintah menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau dalam cakupan publik. Proses pengimplementasian kebijakan publik diharapkan dapat menyelesaikan masalah publik sesuai dengan tujuan dari pembuatan kebijakan itu sendiri. Permasalahan lingkungan merupakan salah satu permasalahan publik yang perlu mendapatkan perhatian baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Permasalahan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini belum bisa teratasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Indonesia. Masalah sampah harus diperhatikan secara intens oleh pemerintah karena manusia dan sampah merupakan faktor penyumbang pencemaran lingkungan terbesar.

Permasalahan sampah kini melanda seluruh negara di belahan dunia ini, sebab sampah akan berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, termasuk fakta bahwa hal tersebut menjadi perhatian negara-negara di Asia Tenggara dan tentunya bagi Indonesia sendiri yang tidak terlepas dari permasalahan sampah juga. Salah satu negara di Asia Tenggara yang menyediakan layanan pengelolaan sampah yang baik ialah Singapura, dengan jumlah penduduk 6.014.723 jiwa pada tahun 2023 dan tentunya setiap hari dapat menimbulkan sampah.

Sebagai contoh yakni pengelolaan sampah di Singapura yang melibatkan pihak pemerintah dan pihak swasta dalam penanganannya. Terdapat beberapa proses yang harus dilalui, pertama yaitu pengangkutan, di Singapura terutama pada bangunan-bangunan HBD atau *Hausing & Development Board* (rumah susun), sudah mempunyai desain standar. Pada masing-masing unitnya memiliki sebuah lubang pembuangan sampah yang bermuara pada sebuah bak sampah berkapasitas cukup besar yang biasanya terletak di bawah masing-masing blok

rumah susun yang kemudian dikumpulkan dan dikompres lalu diangkut oleh truk sampah. Kedua, pengumpulan atau pemilahan sampah yang bertujuan untuk memisahkan antara sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang seperti sampah plastik, karet, kayu, kaleng, besi. Sedangkan sisa-sisa dapur, restoran, dan material lainnya yang tidak dapat didaur ulang kembali akan dibakar.

Ketiga, Daur Ulang dan Pembakaran, Singapura sangat mendorong adanya proses daur ulang ini dengan membuah sebuah *Singapore Packaging Agreement*. Sebuah perjanjian terutama untuk perusahaan packaging dan makanan agar turut mendukung program daur ulang. Perusahaan-perusahaan tersebut harus menekan penggunaan material yang tidak dapat didaur ulang, serta mengutamakan penggunaan material yang dapat didaur ulang. Keempat, Pembuangan Akhir, abu sisa hasil pembakaran pada incinerator kemudian diangkut oleh truk menuju Tuas Marine Transfer Station dan selanjutnya dikirim ke Semakau Landfill dengan menggunakan kapal. Semakau Landfill merupakan tempat pembuangan akhir Singapura yang diresmikan penggunaannya pada bulan April tahun 1999. Keempat tahapan dan proses tersebut merupakan contoh pengelolaan sampah yang dilaksanakan Pemerintah Singapura secara sistematis dan terpadu.

Dengan perbandingan luas serta jumlah penduduk yang sangat jauh berbeda antara Indonesia dengan Singapura, tetapi Indonesia bisa menjadikan Singapura sebagai contoh pengelolaan sampah dengan sangat terkonsep serta dukungan yang positif antara masyarakat dan pemerintah Singapura. Hasil pengelolaan sampah di Singapura digunakan sebagai energi terbarukan untuk menghasilkan listrik (Bona,2019).

Kondisi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera dibenahi secara terstruktur dan efektif oleh pemerintah. Permasalahan ini akan sangat berdampak serius terhadap ekosistem lingkungan. Sampah rumah tangga, limbah pabrik, dan bahan kimia lainnya

yang tidak dipilah terlebih dahulu dan sembarangan dibuang ke sungai dapat menimbulkan sebuah masalah baru yaitu merusak lingkungan hidup disekitarnya serta dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir. Karena sampah yang dibuang ke sungai akan hanyut ke laut, sehingga hal tersebut akan berdampak pada ekosistem laut dan pencemaran laut.

Pada dasarnya semua pihak bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Telah ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah, namun apakah regulasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh semua komponen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah memerlukan penguatan kapasitas semua elemen masyarakat termasuk para pemuda yang merupakan penerus generasi masa yang akan datang.

Masalah pengelolaan sampah seolah hanya terjadi di kota-kota besar saja, sehingga kerap kali mengabaikan pengelolaan sampah di daerah pedesaan. Masih banyaknya masyarakat pedesaan yang belum memahami pengelolaan sampah dengan baik juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Adanya problematika tersebut perlu adanya penyuluhan hukum tentang pengelolaan sampah tidak hanya bagi masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat pedesaan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya tersistematis yang perlu dilakukan, salah satu contohnya yaitu peningkatan kesadaran masyarakat.

Pelaksanaan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum dengan menyampaikan hasil kajian hukum lingkungan dengan tema spesifik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Kegiatan penyuluhan hukum lingkungan tersebut melibatkan masyarakat dan aparatur pemerintahan sebagai audience yang menerima penyuluhan hukum tersebut. Regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;

- b) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah;
- e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.

Regulasi yang mengatur Pengelolaan Sampah Rumah Tangga menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 32 tahun 2009 maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 akan memudahkan dalam melaksanakan dan mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik merupakan perwujudan dari penegakan hukum lingkungan secara konsisten untuk menghasilkan masyarakat yang sadar akan pentingnya lingkungan hidup.

Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan. Arah kebijakan jakstrada memuat tentang pengurangan sampah, penanganan sampah, strategi, program, dan target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Di Indonesia sendiri jumlah total sampah mencapai 68 juta ton pertahunnya dan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Sehingga dari 100 persen pengelolaan sampah yang direncanakan melalui Jakstrada dengan rincian persentase sebesar

30 persen masuk ke target pengurangan (mencegah penumpukan sampah, daur ulang, pemanfaatan kembali), sementara 70 persen sampah pada 2025 masuk ke target penanganan (pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir.).

Berikut capaian kinerja pemerintah dalam pengelolaan sampah selama 2022.



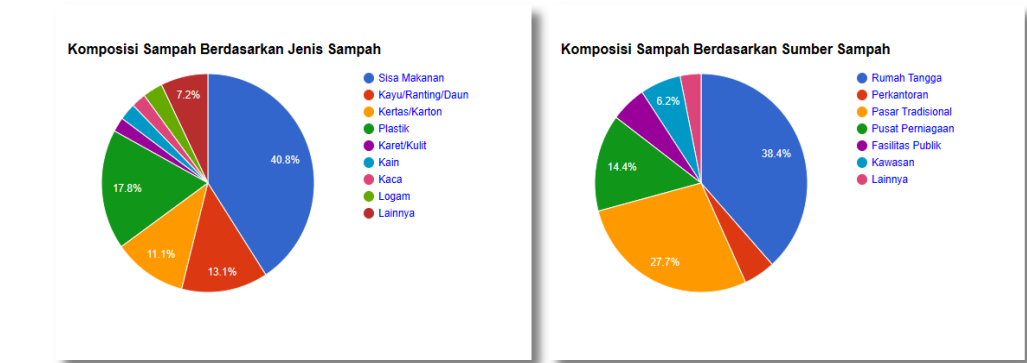
Gambar 1. 1 Capaian Pengelolaan Sampah Di Indonesia

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

Gambar tersebut menjelaskan capaian kinerja pemerintah selama 2022 dalam melakukan pengelolaan sampah. Pencapaian efisiensi dalam hal pengelolaan sampah merupakan suatu keberhasilan pengurangan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, Capaian yang ditunjukkan pada angka di atas berasal dari 293 kota di seluruh Indonesia. Pencapaian efisiensi mencakup banyak hal yaitu volume sampah atau jumlah sampah atau beban sampah yang dihasilkan berdasarkan jenis sampah di daerah tersebut dalam satu tahun, pengurangan sampah, pengelolaan sampah, dan sampah terkelola dan tidak terkelola.

GRAFIK KOMPOSISI SAMPAH

Grafik Komposisi Sampah terbagi 2 yaitu Grafik Komposisi Sampah berdasarkan Jenis Sampah dan Grafik Komposisi Sampah berdasarkan Sumber Sampah. Grafik Komposisi Sampah dibawah ini adalah Tahun 2022.



Gambar 1. 2 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber dan Jenis Sampah

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

Untuk persentase total komposisi sumber sampah yaitu, sampah rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar sebesar 1,212,8 juta atau 38,4% dari total sampah yang dihasilkan pertahunnya. Lalu selanjutnya sampah pasar tradisional sebesar 876,5 juta atau 27,7%, sampah kawasan sebesar 195,7 ribu atau 6,2%, sampah lainnya sebesar 100,7 ribu atau 3,2%, sampah kawasan perniagaan sebesar 454,9 ribu atau 14,4%, sampah fasilitas publik 170 ribu atau 5,4 %, dan sampah perkantoran sebesar 151,1 ribu atau 4,8%.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi kendala yang paling penting dalam menyelesaikan masalah sampah. Misalnya, tidak memilah sampah rumah tangga sebelum membuangnya, membuang sampah ke sungai, dan tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam sistem pengelolaan sampah rumah tangga masyarakat dapat turut berperan aktif melalui bank sampah yang merupakan sumber daya murni dari masyarakat untuk mengelola sampah plastik, dan sampah rumah tangga lain yang langsung dari sumbernya. Bank sampah mempunyai organisasi yang berbeda, dimana mereka bekerja keras untuk membuat masyarakat sadar melalui berbagai macam sosialisasi dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat berdaya dan

turut berperan aktif di dalamnya Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Permana, 2019). Pengelolaan Sampah di masa depan harus berfokus pada mengubah cara pandang masyarakat serta perilaku masyarakat dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan sampah, karena sebagai penghasil sampah terbesar peran masyarakat sangat penting untuk mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah.

Termasuk dalam 21 daerah yang telah menetapkan dokumen Jakstrada tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Pemerintah Provinsi Lampung juga tidak lepas dari persoalan pengelolaan sampah rumah tangga, hal ini disebabkan karena pengelolaan sampah yang kurang baik dan dibuang begitu saja tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu sehingga menyebabkan sampah-sampah tersebut menumpuk di satu titik pembuangan akhir. Merujuk data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, setiap keluarga rata-rata menghasilkan 0,50 sampah kilogram/hari. Sedangkan berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup 2020, jumlah timbunan sampah di Lampung mencapai 1.648.560 ton per tahun.

Sebagai bentuk upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang baik. Pemerintah Provinsi Lampung harus dapat mengimplementasikan Kebijakan Strategi Nasional tersebut untuk diturunkan menjadi sebuah Kebijakan Strategi Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017, hal ini merupakan komitmen antara Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta bagaimana Pemerintah Provinsi dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut ke Kabupaten/Kota.

Sebagai acuan untuk pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dapat melihat Kota Surabaya mengedukasi masyarakat untuk menerapkan pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Pengetahuan masyarakat Kota Surabaya (tentang sampah secara umum, pemilahan sampah, dan 3R) termasuk tinggi (diatas rata-rata yaitu 6,50) namun penerapan pengelolaan sampah di Kota Surabaya (penerapan 3R, pemilahan sampah organik dan non organik serta

pemilahan sampah medis dan non medis) tergolong rendah dan masih perlu di tingkatkan dengan mengacu kepada anjuran dan peraturan dari Pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Kota Surabaya yang berlaku (Juwono & Diyanah, 2021).

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung belum bisa dikatakan baik untuk saat ini dapat terlihat dari pengelolaan dan pengurangan sampah per-tahun 2020, pada tahun 2017-2018 melalui penilaian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kontes kota terbersih atau adipura Kota Bandar Lampung bersama Manado menjadi kota terkotor pada Adipura saat itu. Kebijakan-kebijakan yang telah disiapkan pemerintah fakta di lapangan menunjukkan belum semua berjalan dengan baik, seperti bank sampah yang diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk menanggulangi sampah rumah tangga serta sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Tetapi di Kota Bandar Lampung bank sampah kurang berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia dan biaya pengelolaan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, contohnya pada bank sampah yang terletak di Lapangan Kalpataru Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling.

Evaluasi atas sebuah implementasi kebijakan sangat perlu dilakukan untuk memperoleh informasi pengambilan keputusan program yang sedang berlangsung dan mengeksplorasi bagaimana dan mengapa hasil tidak tercapai. Kegiatan evaluatif penting untuk pemerintahan yang baik dan dapat berkontribusi pada kemajuan kebijakan publik yang lebih efektif dan efektif. Pada penelitian ini, analisis didasarkan pada model yang dikembangkan oleh George Edward III. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III menitikberatkan analisis pada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Suatu kebijakan memiliki tujuan yang baik, namun dalam proses pengimplementasiannya jika terjadi kegagalan maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Begitu juga dengan pengelolaan sampah rumah tangga walaupun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, namun jika tidak diimplementasikan dengan baik maka program ini tidak berhasil mencapai tujuannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibuat penulis di latar belakang, demikian penulis mencoba untuk mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga di kota Bandar Lampung?
2. Apa saja dukungan dan hambatan dalam pengimplementasian pengelolaan sampah di kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti ajukan , maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan hambatan dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah di kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang akan penulis lakukan, dengan cara menerapkan ilmu serta teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam melakukan pembahasan terhadap

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak-pihak lain pada umumnya yang berkaitan langsung pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis menemukan penelitian dengan tema yang sama dari peneliti terdahulu sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Agnes Fitri Widiyanto, Oktafiani Catur Pratiwi, Saudin Yuniarno	Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas	Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan yang terjadi di masyarakat dimulai dari pengumpulan, pengolahan, pembuangan dan pengolahan tahap akhir. Peran serta masyarakat dan peran pemerintah yang bersinergi akan memperkuat pengelolaan sampah. Kegiatan pengolahan sampah akan lebih efektif jika dimulai dari sumbernya.	Penelitian Terdahulu Dilakukan Di Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung
2.	Aditya Nugraha, Surjono H.Sutjahjo, Akhmad Arif Amin	Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap	Secara keseluruhan, nasabah Bank Sampah Rawajati ternyata memiliki persepsi	Penelitian Terdahulu Dilakukan Di Kota Jakarta Selatan, sedangkan penelitian

		Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Di Jakarta Selatan	positif terhadap 3R atau mendukung penanganan sampah yang berwawasan lingkungan. Semakin baik persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga, maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, begitu juga sebaliknya, semakin negatif persepsi seseorang terhadap pengelolaan sampah rumah tangga, maka akan semakin rendah partisipasinya dalam pengelolaan sampah rumah tangga.	ini dilakukan di Kota Bandar Lampung
3.	Edy Nurcahyo, Ernawati	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Mabulugo, Kabupaten Buton	Paradigma pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem 3R (reduce, reuse, recycle) sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.	Penelitian Terdahulu Dilakukan Di Kabupaten Buton, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung

			Paradigma pengelolaan sampah dengan sistem 3R diatur dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
--	--	--	--	--

2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menjadi sebuah rangkaian penting setelah sebuah kebijakan diformulasikan, tanpa adanya suatu pelaksanaan, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan berakhir sia-sia, maka dari itu pelaksanaan kebijakan termasuk hal yang penting dalam sebuah pembahasan kebijakan publik (Etih Henriyani 2015). Jadi fungsi dari implementasi adalah untuk membentuk sebuah proses yang memungkinkan tujuan-tujuan maupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai hasil akhir atau outcome.

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu unsur penting dalam administrasi publik. Sebagai salah satu unsur penting, kebijakan publik diibaratkan fungsinya seperti otak manusia, artinya kebijakan publik disini berperan penting dalam kehidupan bernegara. Dikarenakan melalui kebijakan publik segala aktivitas bernegara diatur di kebijakan publik.

David Easton (1969) menyatakan kebijakan publik dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan

publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah. Robert Eyestone mengartikan kebijakan publik secara luas dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai democratic governance, dimana didalamnya terdapat interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik (Handoyo, 2012).

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Ripley dan Franklin (1982) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah penetapan undang-undang yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, ataupun sejenis keluaran yang nyata. Problem implementasi diasumsikan sebagai sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak terlalu perlu mendapat perhatian dari para sarjana yang mempelajari politik. Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai penerapan atau tahap pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi, sebelum diimplementasikannya sebuah kebijakan terlebih dahulu harus dirancang di formulasi kebijakan. Maka dari itu, implementasi lebih bersifat praktis sedangkan formulasi lebih bersifat teoritis. Implementasi kebijakan lebih mengarah kepada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Paul A. Sabatier & Daniel Mazmanian, 1980 dalam (Subianto 2020:21) menjelaskan bahwa, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi menyebutkan secara tegas tujuan maupun sasaran yang akan dicapai, serta berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi.

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan

Keberadaan berbagai model implementasi kebijakan atau program digunakan untuk melihat bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan sehingga memberikan gambaran pada sebuah pencapaian tujuan terutama mengenai hasil dan manfaatnya. Ada berbagai macam model implementasi kebijakan publik yang dijelaskan oleh berbagai ahli, antara lain sebagai berikut :

A. Model Van Meter & Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Abdal 2015:174) proses Implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai Indikator. Dalam model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Terdapat beberapa Indikator yang saling berkaitan, antara lain :

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai

oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2. Sumber daya

Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan sangat dipengaruhi dari bagaimana kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan agen pelaksana yang meliputi organisasi formal maupun informal akan ikut terlibat dalam pengimplementasian kebijakan, hal ini dikarenakan kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh cirri yang tepat serta para agen pelaksananya. Van Meter dan Van Horn menjelaskan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, antara lain:

- a. Kompetensi dan ukuran Staff suatu badan
- b. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan pelaksana
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif)
- d. Vitalitas suatu organisasi
- e. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu individu di luar organisasi

f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

4. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Van Meter dan Van Horn mengemukakan menurut pandangan mereka kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, hal yang menjadi standar harus dipahami oleh para pelaksana yang bertanggung jawab atas pencapaian standard dan tujuan kebijakan, maka dari itu standar dan tujuan dari kebijakan yang akan diimplementasikan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, dan demikian sebaliknya.

5. Disposisi atau Sikap para pelaksana

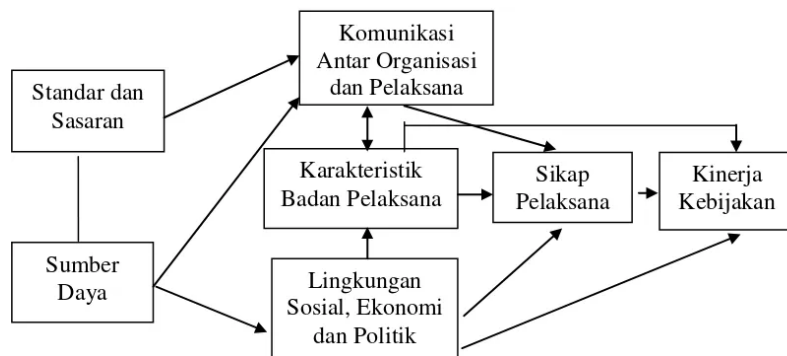
Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang memang merasakan permasalahan dan persoalan tersebut. Tetapi kebijakan publik yang saat ini biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui dan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain:

- a. Pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan
- b. Arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*)
- c. Intensitas terhadap kebijakan

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Salah satu hal yang diperlukan untuk menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Upaya implementasi kebijakan mengharuskan kondisi eksternal yang kondusif.



Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

Sumber : Van Meter dan Van Horn (1975 : 463)

B. Model Nakamura & Smallwood

Nakamura & Swallowwood mengemukakan bahwa proses kebijakan merupakan proses yang kompleks dan rumit. Implementasi kebijakan merupakan salah satu dari proses kebijakan tersebut yang tidak bisa dipisahkan dengan yang

lainnya. Salah satu cara untuk mempelajari implementasi kebijakan adalah dengan melihat kebijakan publik sebagai sebuah sistem. Sebuah sistem tanpa adanya perangkat lain yang mendukung maka kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik. Unsur utama pada proses kebijakan dapat dilihat sebagai seperangkat lingkungan fungsional, dimana prosesnya beragam (1980). Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Nakamura & Swallowwood disebut dengan *environments influencing implementation*, yang memiliki 3 elemen yakni:

Lingkungan Kebijakan	Fungsi
Lingkungan I	Formulasi Kebijakan
Lingkungan II	Implementasi Kebijakan
Lingkungan III	Evaluasi Kebijakan

Sumber : Deddy Mulyana, 2016

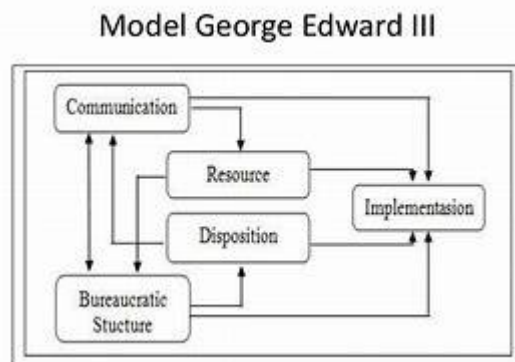
C. Model George Edward III

Model Implementasi Kebijakan George Edward III mengemukakan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi kebijakan. Menurut Edward, tanpa implementasi kebijakan yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dengan baik. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward menyarankan empat isu pokok yang harus diperhatikan (Handoyo, 2012).

- 1) Komunikasi (*Communication*) berkaitan dengan kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumberdaya kebijakan, sikap dan respon

dari pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.

- 2) Sumberdaya (*Resources*) berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, utamanya sumberdaya manusia dari sisi kuantitas serta kualitas, aspek sumberdaya yang penting dalam hal ini adalah keahlian pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif.
- 3) Komitmen (*Disposition*) berkenaan dengan kesediaan dan komitmen dari para pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.
- 4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik, dalam hal ini yang perlu dijaga agar dalam implementasinya tidak terjadi bureaucratic fragmentation, karena struktur demikian akan menghambat pelaksanaan kebijakan publik.



Gambar 2. 2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

Sumber : Model Implemetasi Edward III, 1980: 48

Dari penjelasan diatas terkait model-model implementasi kebijakan , penulis memilih model George Edward III sebagai

fokus penelitian dikarenakan model ini sesuai dengan fokus dari penelitian ini “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung”. Penelitian menurut model George Edward III memiliki 4 faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu, Komunikasi, Sumberdaya, Komitmen, Struktur Birokrasi. Penulis memilih model ini karena penelitian ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipaparkan oleh George Edward III.

2.3 Tinjauan Tentang Sampah Rumah Tangga

Berbagai upaya dilakukan untuk mengelola sampah rumah tangga, karena dengan mengelola sampah rumah tangga dari awal sampah itu berasal dapat mengurangi jumlah timbunan sampah, biaya transportasi pengangkutan sampah dapat ditekan, dan pada akhirnya secara jangka panjang dapat memperpanjang umur lokasi TPA (Rosmala et al., 2020).

Menurut asalnya sampah dibagi dalam :

1. Sampah buangan rumah tangga; termasuk sampah biasa, bahan makanan, sampah sisa makanan, pembungkus makanan dan pembungkus perabotan rumah tangga, sampah sisa tumbuhan kebin dan sebagainya.
2. Sampah buangan pasar dan tempat-tempat umum (warung, toko dan sebagainya) termasuk sisa makanan, sampah pembungkus makanan dan pembungkus lainnya, sampah taman dan sebagainya
3. Sampah jalanan; termasuk diantaranya sampah debu jalanan, sampah sisa tumbuhan taman, sampah pembungkus bahan makanan dan bahan lainnya, sampah sisa makanan, sampah berupa kotoran serta bangkai hewan.
4. Sampah industri termasuk diantaranya air limbah industri, debu industri, sisa bahan baku dan bahan jadi dan sebagainya.

Sampah menurut jenisnya dibagi dalam:

1. Sampah organik adalah sampah termasuk diantaranya sisa bahan makanan serta sisa makanan, sisa pembungkus dan sebagainya.

Keseluruhan dikenal sebagai sampah pasar serta sampah industri bahan makanan.

2. Sampah anorganik adalah sampah termasuk di antaranya berbagai jenis sisa gelas, logam, plastik dan sebagainya. Biasanya jenis ini terbagi atas sampah yang dapat dihancurkan dan yang tak dapat dihancurkan oleh mikroorganisme termasuk sampah anorganik, misalnya sisa-sisa mobil bekas, gelas, dan sebagainya.

Termasuk darimana sampah itu berasal, sampah rumah tangga adalah salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah agar tidak jadi timbunan sampah yang menumpuk. Dalam kegiatan mengolah sampah dengan konsep 3R sampah rumah tangga dapat dijadikan sarana pembuatan kerajinan tangan sebagai sebuah proses pengelolaan sampah rumah tangga agar sampah yang telah dilakukan pengelolaan yang baik dapat bernilai kembali.

2.4 Tinjauan Tentang Pengelolaan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*)

Pengelolaan merupakan suatu upaya untuk mencegah serta tahap awal untuk melakukan penanganan terhadap sebuah permasalahan, dalam hal ini pengelolaan sampah dilakukan untuk menekan penumpukan sampah serta menekan dampak negatif yang mungkin terjadi dari sampah serta memikirkan bagaimana pemanfaatannya. Pengelolaan sampah secara umum bertujuan untuk menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik dengan pendekatan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan kembali agar dapat digunakan untuk menghilangkan kesan bahwa sampah tidak lagi berguna.

Ada beberapa poin-poin penting dalam pengelolaan sampah serta rangkaian untuk pembuangan sampah yang ideal sebagai berikut:

1. Pemilahan

Pemilahan ini dimulai dari sumber dihasilkannya sampah yang terdiri dari sampah organik dan anorganik, pemilahan sampah yang mewakili sumber energi tinggi dan pemanfaatan kembali sampah yang memiliki nilai kegunaan yang tinggi.

2. Pewadahan

Kegiatan pewadahan secara individual harus disediakan di tingkat rumah dengan menyediakan 2 unit penampung sampah yang memisahkan antara sampah organik dan anorganik, pewadahan komunal (Kontainer dan TPS) khusus untuk menampung berbagai jenis sampah baik organik maupun anorganik seperti untuk sampah plastik, gelas, pakaian/tekstil, logam, sampah besar, sampah B3.

3. Pengumpulan

Meliputi waktu pengumpulan secara rumah ke rumah setiap 1 sampai 2 hari dan pengumpulan sampah dari TPS 1 kali seminggu.

4. Pengangkutan sampah

Kegiatan pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan compactor truck berbeda untuk setiap jenis sampah.

5. Daur ulang

Merupakan kegiatan pemanfaatan kembali berbagai jenis sampah seperti kertas, plastik, peralatan elektronik bekas, serta kaca, dan limbah organik seperti daun, masing-masing jenis sampah tersebut dapat dilakukan proses daur ulang agar dapat bermanfaat kembali.

6. Kompos

Kegiatan pengomposan memerlukan sarana percontohan, penyuluhan, pelatihan dan pembinaan pengomposan ini dapat dilakukan dalam skala lingkungan yang dikelola oleh masyarakat sekitar, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sampah rumah tangga harus dikelola di sumbernya.

Salah satu dasar pengelolaan sampah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang menjelaskan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008.) dan saat ini pemerintah berfokus dalam pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, untuk daerah Kota Bandar Lampung terdapat Peraturan Daerah Kota

Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah sebagai dasar pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

Menjadi perhatian pemerintah salah satu strategi pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dilakukan dengan konsep 3R yaitu Reuse, Reduce, dan Recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah.. Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat (Dermawan, Lahming,S. Mandra 2018).

Penerapan konsep 3R ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kondisi yang ada saat ini Pemerintah daerah, yang ditugaskan mengelola sampah, secara umum belum efektif menyelesaikan masalah sampah rumah tangga. Anggaran, sumber daya manusia (SDM), fasilitas pengelolaan sampah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum sebanding dengan besarnya volume sampah, sehingga hanya sebagian saja sampah yang berhasil dikelola sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, masih banyak sampah yang dibuang sembarangan, sekalipun sudah disediakan berbagai TPS, TPA, serta sarana prasarana pendukungnya (Marlina, 2020).

2.5 Kerangka Pikir

Tingginya angka timbunan sampah, minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga, masyarakat membuang sampah tanpa melakukan pemilahan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan sampah serta memberikan sosialisasi terkait pengelolaan sampah di Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017) dan Peraturan Daerah NO. 5 Tahun 2015 Kota Bandar Lampung Dalam pengelolaan sampah rumah tangga

Proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung.

Dengan Faktor Menurut George Edward III sebagai berikut :

- Komunikasi
- Sumberdaya
- Komitmen
- Struktur Birokrasi

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung

Apa saja masalah yang menghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2009: 21), menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam riset ini kelengkapan serta kedalaman data yang diteliti merupakan suatu hal yang sangat penting. Mengenai proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan) (Sugiyono 2012:208), masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah :

1. Aktivitas penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga setelah kebijakan disahkan di Kota Bandar Lampung.
2. Proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung. Dengan Indikator sebagai berikut:
 - a. Komunikasi

Komunikasi pada penelitian ini meliputi komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung secara internal di dalam Dinas serta secara eksternal kepada NGO yaitu WALHI dan Masyarakat yaitu ketua PKH Sukarame dan Pendiri bank sampah lestari sejahtera

b. Sumber Daya

Dalam penelitian ini sumberdaya manusia meliputi kualitas dan kuantitas pekerja dari dinas lingkungan hidup, dan sumberdaya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah rumah tangga dan anggaran menjadi fokus utama yang ingin peneliti teliti.

c. Komitmen

Berkaitan dengan komitmen pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk komitmen.

d. Struktur Birokrasi

Berkaitan dengan pembagian tugas pada struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta melihat SOP dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

3. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi tersebut karena Kota Bandar Lampung sebagai pusat kota, pusat pemerintahan serta dengan mobilitas penduduk yang tinggi sehingga menjadi salah satu penghasil sampah terbanyak di Provinsi Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian, maka pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari penelitian langsung kepada objek dengan teknik catatan ilmiah, wawancara langsung, serta dokumentasi resmi lainnya. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain:

A. Data Primer

Data primer menurut Umar (2014:42) adalah data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data-data yang dijangkau, dikodifikasikan dan di deskripsikan adalah sumber jawaban informan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam wawancara dan questioner. Data primer yang dimaksud ini adalah jawaban dari lembar questioner yang diberikan kepada responden.

B. Data Sekunder

Data sekunder menurut Umar (2014:42) adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua atau sekunder yang kita butuhkan. Adapun data sekunder yang berasal dari artikel-artikel yang dipublikasikan di internet serta berbagai literature yang mendukung permasalahan seperti buku-buku dan perundang-undangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data untuk diolah, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu kegiatan untuk mempelajari serta menelusuri berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibuat dan dipelajari literatur-literatur serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti pula. Literature yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan – bahan dokumentasi, majalah - majalah, koran - koran yang merupakan bahan tertulis.

2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu:
 - a. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menyajikan gambaran realistic perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan.
 - b. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab antara peneliti dengan yang diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
 - c. Penelitian dokumen, yaitu pengumpulan data dari dokumen yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan masalah yang akan diteliti.
 - d. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan membaca serta mengambil segala dokumentasi kejadian, peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

3.6 Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono 2012:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.6.1 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono 2012:247). Data yang diperoleh peneliti di lapangan kemudian dipilih melalui reduksi data

sehingga didapatkan data yang berfokus dan berhubungan dengan penelitian atau tidak. Dalam penelitian ini proses reduksi data dilakukan dengan memilah serta menyeleksi data yang dibutuhkan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung dan mana yang tidak dibutuhkan. Kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono 2012:249) menyatakan dalam melakukan penyajian data selain dengan teks yang naratif dapat menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja, dan chart. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini penyajian data yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dengan mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara dengan informan yang kemudian didukung dengan dokumen-dokumen, table, dan foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pengambilan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono 2012:252). Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini pengambilan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti dari serangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono 2012:268). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi.

3.7.1 Kredibilitas Data (*Credibility*)

Uji kredibilitas data menunjukkan bahwa hasil-hasil penemuan dapat dibuktikan dengan cara peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Untuk menguji kredibilitas, peneliti melakukan Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh secara meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Terdapat 3 macam triangulasi dalam menentukan keabsahan data yaitu: (1) Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, (2) Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi atau kuesioner; (3) Triangulasi waktu, dalam melakukan kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau situasi yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti memutuskan untuk menggunakan salah satu saja dari ketiga macam triangulasi yaitu menggunakan triangulasi sumber.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan melalui derajat kepercayaan dengan menggunakan cara triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Teknik yang sama berarti mengajukan pertanyaan yang sama ketika melakukan wawancara terkait implementasi kebijakan pengelolaan

sampah rumah tangga kepada para informan seperti Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta Staff bidang pengelolaan sampah dan LB3, NGO Walhi Lampung, dan Masyarakat yaitu Ketua PKH Sukarame dan Pendiri Bank Sampah Lestari Sejahtera, yang berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti.

3.7.2 Teknik Pengujian Keteralihan Data (*Transferability*)

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain (Sugiyono 2012:276). *Transferability* akan tercapai apabila pembaca memperoleh gambaran yang semakin jelas. Maka dari itu penelitian ini akan menyajikan laporan yang sedemikian rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3.7.3 Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data (Sugiyono 2012:277). Penelitian seperti ini perlu diuji dependability dan untuk mengecek apakah hasil penelitian yang dilakukan peneliti benar atau tidak.

3.7.4 Teknik Kepastian Data (*Confirmability*)

Teknik pengujian kepastian data (*confirmability*) dilakukan untuk mengetahui proses penelitian, sehingga tidak memunculkan penelitian yang hanya ada hasilnya tetapi tidak ada proses penelitian. Dalam pengujian kepastian data sama halnya dengan uji kebergantungan sehingga prosesnya dilakukan melalui pengujian hasil penelitian oleh dosen pembimbing serta dosen pembahas. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah salah satu dari lima belas kabupaten/kota yang ada di provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung, sehingga segala bentuk aktifitas perekonomian dan pemerintahan Provinsi Lampung bertumpu pada Kota yang berslogan kan ragam gawi yang bermakna gotong royong dan kerja sama. Kota ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung. Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

a. Keadaan Geografi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah daratan 197,22 Km² , dengan panjang garis pantai sepanjang 27,01 Km, dan luas perairan kurang lebih 39,82 Km² yang terdiri dari Pulau Kabur dan Pulau Pasaran. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak

pada koordinat 5° 20' - 5°30' Lintang Selatan dan 105°28'-105°37' Bujur Timur.

b. Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk Di Bandar Lampung sebesar 1.162.242 jiwa per tahun 2023 yang tersebar ke dalam 20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung. Jika dilihat berdasarkan persebaran penduduk Kecamatan Panjang menjadi Kecamatan terpadat sedangkan untuk Kecamatan enggal paling sedikit.

c. Jumlah Timbunan Sampah Harian Kota Bandar Lampung

Timbunan sampah adalah jumlah sampah atau berat sampah yang didapatkan dari sumber sampah pada suatu wilayah tertentu dalam satu waktu. Laju timbunan sampah dapat dinyatakan dalam beberapa satuan (Enri Damanhuri dan Tri Padmi,2014).

Sebanyak 20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung menghasilkan sampah setiap harinya. Timbunan sampah terbanyak yaitu di Kecamatan Kemiling, Way Halim dan Tanjung Karang Pusat dengan total timbunan sampah 54ton/hari. Sedangkan Kecamatan dengan timbunan sampah terkecil terdapat pada Kecamatan Tanjung Karang Barat sebanyak 10ton/hari. Jumlah penduduk dapat mempengaruhi jumlah volume sampah harian di Kota Bandar Lampung di setiap Kecamatan.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung merupakan instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah salah satu instrumen pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung yang

memiliki tugas pokok melindungi, mengelola, melestarikan, dan mencegah terjadinya potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan sampah, pemeliharaan lingkungan dan taman, dan penegakan hukum.
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai tugas lingkupnya.
- Pengawasan, pemantauan, pengujian, serta pengelolaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai tugas lingkupnya.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah keseluruhan pegawai Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) pada tahun 2021-2026 berjumlah 1120. Pegawai yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terbagi ke beberapa lingkup bidang seperti Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Unit Pelaksana Teknis. Untuk Bidang Pengelolaan Sampah terdapat 194 pegawai.

4.1.2 Bidang Pengelolaan Sampah

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengelolaan sampah. Bidang Pengelolaan

Sampah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan sampah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan dan program bidang pengelolaan persampahan.
- b. Perencanaan dan Evaluasi Tugas
- c. Pegggerakan pasrtisipasi Masyarakat melalui Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI).
- d. Penyusunan dan Pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- e. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan sampah terakhir.
- f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja yang dilakukan pihak lain (badan usaha).
- g. Penyiapan pengadaan suku cadang sarana dan prasarana persampahan.
- h. Pengoordinasian kerjasama dengan pihak ketiga (pemerintah, swasta, maupun masyarakat).
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4.1.3 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, memerlukan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengelolaan sampah serta lingkungan di Kota Bandar Lampung dan menunjang pelaksanaan program dalam pembangunan daerah berbasis lingkungan.

4.1.3 Gambaran Umum Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Lampung

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 propinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pemunahan sumber-sumber kehidupan rakyat.

WALHI menyadari bahwa perjuangan tersebut dari hari kehari semakin dihadapkan dengan tantangan yang berat, terutama yang bersumber pada semakin kukuhnya dominasi dan penetrasi rezim kapitalisme global melalui agenda-agenda pasar bebas dan hegemoni paham liberalisme baru (neo-liberalism), dan semakin menguatnya dukungan dan pemihakan kekuatan politik dominan di dalam negeri terhadap kepentingan negara-negara industri atau rejim ekonomi global. Rezim kapitalisme global menempatkan rakyat, lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, bahkan bumi sebagai tumbal akumulasi kapital. Eksploitasi dan pengerukan sumber daya alam yang tiada habisnya yang berujung pada krisis lingkungan hidup, telah mempengaruhi tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan pada akhirnya meningkatkan ancaman kerentanan keselamatan dan kehidupan seluruh warga negara, baik di perdesaan maupun perkotaan.

Di tengah tantangan perjuangan penyelamatan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang begitu berat, dibutuhkan gerakan sosial yang kuat dan luas untuk secara bersama-sama memperjuangkan keadilan ekonomi, sosial dan ekologis untuk generasi hari ini dan generasi mendatang. WALHI memastikan dirinya menjadi bagian utama dari gerakan ini.

Cikal bakal berdirinya WALHI Lampung sejak 15 Oktober 1991, saat ini memiliki 15 Lembaga Anggota dan 4 Anggota individu. WALHI Lampung merupakan

organisasi publik yang mandiri dan tidak berorientasi laba. WALHI Lampung membuka keanggotaan baik yang berasal dari organisasi maupun individu. WALHI Lampung juga membuka diri bagi setiap orang untuk bergabung menjadi sahabat WALHI untuk bersama-sama melakukan pembelaan dan penyelamatan lingkungan hidup. Gerakan WALHI pertama kali di Lampung ditandai dengan keikutsertaan kelompok pecinta alam dalam acara “Sarasehan Lingkungan Hidup antar-LSM, Perguruan Tinggi, Pencinta Alam dan Pemerintah se-Sumatera,” pada tahun 1987, Kelompok Pencinta alam yang mewakili lampung adalah Pencinta Alam Watala dan Putra Rimba (Edi Karizal Watala, Sentot Puri). Kantor WALHI Lampung beralamat Jl. ZA Pagaram Gg. Erra No.3, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung.

1. Visi Walhi

Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

2. Misi Walhi

- a) Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
- b) Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat
- c) Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan
- d) Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru
- e) Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Bandar Lampung

Dalam mewujudkan tujuan pemerintah pusat yaitu Indonesia bebas sampah pada tahun 2025. Pemerintah mendorong masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang sampai ke TPA.

Untuk mewujudkannya Pemerintah Pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, yang mengharuskan Pemerintah Daerah menerapkan peraturan tersebut di daerahnya masing-masing dalam bentuk Kebijakan Dan Strategi Daerah (Jakstrada) dan disahkan menjadi Peraturan Daerah. Jakstrada Kota Bandar Lampung untuk Pengelolaan Sampah masih dalam proses perumusan sehingga masih menggunakan peraturan lama yaitu Peraturan Daerah No.5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Upaya- upaya yang dilakukan DLH dalam pengelolaan sampah rumah tangga, sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bersama Pemerintah Kota berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan melakukan sosialisasi, terkait bagaimana proses pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga yang dapat dilakukan per keluarga di setiap rumah.

Sosialisasi dilakukan DLH yang bekerjasama dengan NGO WALHI Lampung dalam menyampaikan informasi pengelolaan sampah rumah tangga kepada masyarakat melalui diskusi publik yang diselenggarakan bersama Walhi dengan topik bahasan terkait kajian kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

2. Membangun Sarana Penunjang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pengelolaan sampah rumah tangga pada tingkat masyarakat membutuhkan fasilitas penunjang dalam proses pengelolaan, dalam hal ini berdasarkan kerjasama antara DLH bersama KLHK RI telah terdapat tiga TPS3R yang terletak di Kecamatan

Wayhalim, Kemiling, dan Sukarame, ketiga TPS3R tersebut dilengkapi dengan mesin pencacah sampah plastik serta mesin pembuatan pupuk organik.

3. Melakukan Kerjasama Dengan NGO

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga beberapa kali melakukan kerjasama dengan beberapa NGO yang ada di Kota Bandar Lampung, upaya ini dilakukan agar DLH mendapatkan sudut pandang dari NGO yang berfokus di kegiatan pelestarian lingkungan. Sebagai salah satu NGO terbesar yang bergerak pada aspek pelestarian lingkungan WALHI sering memberikan kritik untuk kebijakan DLH dalam pelestarian lingkungan salah satunya pengelolaan sampah rumah tangga.

WALHI sangat serius melakukan beberapa kajian dalam pengelolaan sampah rumah tangga salah satunya terkait rencana Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuat PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dikarenakan untuk saat ini TPA Bakung yang digunakan sebagai tempat pembuangan akhir telah mengalami kelebihan kapasitas, oleh karena itu Walhi bersama DLH Kota Bandar Lampung beberapa kali melakukan kajian publik secara bersama terkait pembahasan kajian kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, serta membahas urgensi dari pembangunan PLTSa di Kota Bandar Lampung.

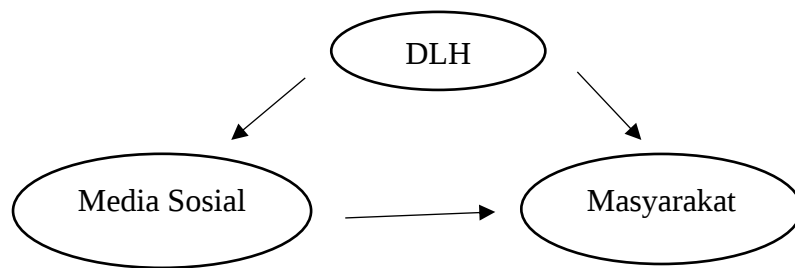
Analisis penelitian ini melihat bagaimana proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George Edward III dengan menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yaitu : a.Komunikasi, b.Sumberdaya, c.Komitmen, d.Struktur Birokrasi

A. Komunikasi

Prinsip awal menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, adalah komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian yang tepat yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana kebijakan. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para pelaksana akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Pelaksanaan proses komunikasi dalam implementasi Kebijakan Dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdapat faktor pendorong yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana, kejelasan informasi kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan baik, serta terdapatnya konsistensi dalam pencapaian implementasi kebijakan, artinya tidak ada perintah yang bertentangan. Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai JAKSTRADA pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga belum secara menyeluruh, informasi mengenai kebijakan JAKSTRADA pengelolaan sampah rumah tangga baru dilakukan melalui media komunikasi.

Komunikasi yang dilakukan merupakan komunikasi tatap muka yang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan masyarakat melalui sosialisasi. Berikut digambarkan pola komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat mengenai JAKSTRADA pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.



Pola Komunikasi

B. Sumberdaya

Selain jumlah staf, sumber informasi juga merupakan salah satu mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan, para pelaksana perlu mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakn-kebijakn sesuai dengan petunjukpetunjuk dari para atasan. Selanjutnya wewenang, wewenang merupakan sumber lain yang penting bagi implementasi kebijakan. Wewenang ada dalam banyak bentuk dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, penyediaan fasilitas-fasilitas yang layak untuk mendukung implementasi yang efektif tidaklah selalu mudah. Terkadang terkendala di anggaran dana dan tempat yang tidak memadai. Hal yang sesuai juga di ungkapkan Islamy (1998) dalam Siregar (2014:170) mengatakan bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan resources yang cukup, seperti human resources (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya), *financial resources*, *technolo-gical resources*, maupun *psychological resources*.

C. Komitmen Pemerintah (Disposisi)

Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat di wujudkan. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam implementasi (JAKSTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Tanjungpinang dapat dilihat

melalui tingkat kepatuhan pelaksana. Berdasarkan hasil obeservasi di lapangan, jika dilihat dari sikap pelaksana terkait sudah cukup baik hal tersebut dibuktikan dengan peran para pelaksana dalam keberhasilan JAKSTRADA pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada terkait permasalahan sampah.

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan menurut Hessel (2003) dalam Siregar (2019:170) menyatakan jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit.

D. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik utama birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan SOP di Dinas terkait untuk kegiatan program memang sudah ada ditetapkan di dinas terkait, sehingga tidak ada terjadinya kerancuan, SOP merupakan acuan untuk kinerja pegawai. Edward III dalam Winarno (2012:239) menyebutkan bahwa salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Standard Operating Procedures, SOP), Standard Opsional Prosedur (SOP) ini dapat membantu dan menyeragakan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Kendala Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Bandar Lampung

1. Faktor-faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

a. Adanya Kelompok Pengelolaan Sampah

Adanya kelompok pengelolaan sampah rumah tangga yang peduli terhadap lingkungan merupakan faktor yang dapat mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga. Pionir ini menjadi pemantik dan peduli terhadap program-program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, serta lebih disiplin dalam melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. beberapa kelompok pendorong pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung melakukan inisiasi pembentukan bank sampah secara mandiri oleh masyarakat, dapat diambil contoh bank sampah lestari sejahterah dan bank sampah emak.id serta komunitas nabay hagum adalah bukti inisiasi masyarakat berdasarkan kepedulian untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga, serta menggerakkan masyarakat sekitar bank sampah untuk mulai melakukan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Konteks pengelolaan sampah adalah individu atau kelompok yang memainkan peran penting dalam mendorong perubahan perilaku dalam masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Mereka bertindak sebagai pendorong atau pelopor dalam meningkatkan kesadaran tentang masalah sampah dan memberikan solusi untuk mengatasinya. *Agen of change* dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti pemerintah, organisasi lingkungan, atau masyarakat sipil. Mereka dapat bekerja secara individu atau dalam kelompok, dan dapat melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan pengelolaan

sampah, seperti: memberikan edukasi tentang masalah sampah dan bagaimana mengelola sampah dengan benar.

b. Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Pihak Swasta

Dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung Pemerintah melakukan kerjasama yang melibatkan PT. Wijaya Karya (WIKI) untuk melakukan pengelolaan sampah yang ada di TPA Bakung dan TPS yang ada di Kota Bandar Lampung, kerjasama bertujuan untuk pengolahan sampah yang nantinya akan didaur ulang menjadi briket, Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat menjalin kerjasama pula dengan komunitas yang bergerak dalam pengelolaan sampah rumah tangga, karena ada beberapa komunitas yang menjanjikan dan dapat diberdayakan lebih bila mendapat Perhatian Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan kerjasama bersama komunitas Pemerintah dapat secara tidak langsung melakukan pemberdayaan masyarakat melalui komunitas serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah, yang akan menggerakkan masyarakat untuk mulai melakukan pengelolaan sampah secara mandiri pada tingkat rumah tangga.

2. Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

a. Kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah

Pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga ini komunikasi yang dilakukan oleh DLH belum masif ke masyarakat terkait pengelolaan sampah, hal ini berpengaruh terhadap sosialisasi untuk masyarakat yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga, untuk saat ini masih banyak masyarakat kota Bandar Lampung yang belum mengetahui

bagaimana melakukan pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga, sehingga hanya membuang sampah begitu saja ke TPS tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu.

b. Sumberdaya yang belum optimal

Belum optimalnya aspek sumberdaya manusia yang ada pada DLH Kota Bandar Lampung dari sisi kuantitas dan kualitas dapat dilihat dengan belum terdapatnya tenaga ahli yang ada di TPS maupun TPS3R di Kota Bandar Lampung untuk memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga ke masyarakat.

Anggaran yang dimiliki DLH menjadi salah satu kendala dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga hal ini didasari saat ini masih kurang meratanya fasilitas penunjang pengelolaan sampah rumah tangga, serta beberapa fasilitas pengangkut yang mulai tidak layak digunakan masih beroperasi hingga saat ini, dan mengakibatkan truk pengangkut sempat terguling hal ini dikarenakan kurangnya anggaran untuk melakukan pergantian hingga penambahan fasilitas-fasilitas tersebut.

Sehingga diperlukan peningkatan fasilitas terutama pada peningkatan pelaksanaan program TPS 3R. Dengan peningkatan program TPS 3R menurut (Supriyanto et al., 2021) dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik sehingga pengolahan sampah lebih efisien dan lebih teratur. Kemudian diimbangi pada masa keberlanjutan dan pemeliharaan pada TPS 3R yang sudah ada (Solihin & Mulda, 2019).

c. Kurangnya komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung

Pemerintah dalam hal ini DLH selaku pelaksana dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung, saat ini belum menunjukkan komitmen lebih untuk mulai turun langsung secara berkala ke masyarakat dalam menyebarkan informasi untuk melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, peneliti menilai untuk saat ini komitmen yang dilakukan pemerintah belum terlalu masif, hal ini peneliti dapati dari proses wawancara bersama narasumber bahwa saat ini sarana masyarakat untuk mendapat informasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga masih ngat minim, maka kurangnya komitmen pemerintah ini dapat menjadi sebuah kendala dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah tangga bilamana pemerintah tidak sepenuhnya berkomitmen untuk memulai menggerakkan masyarakat selaku aktor utama dalam melakukan pengelolaan sampah di level rumah tangga.

Dari ketiga kendala yang peneliti tuliskan termuat pula beberapa kendala di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 terdapat beberapa kendala pula dalam proses implementasi pengelolaan sampah rumah tangga seperti keterbatasan alokasi ggaran untuk urusan bidang lingkungan hidup, kurangnya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan rehabilitasi lingkungan hidup yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan, masyarakat dan pelaku usaha kurang memperhatikan atau mengacuhkan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung telah melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung, upaya tersebut dengan melakukan, pertama sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga kepada masyarakat, untuk saat ini sosialisasi yang dilakukan belum masif ke masyarakat, kedua membangun sarana penunjang pengelolaan sampah rumah tangga seperti TPS3R, serta mengembangkan program bank sampah, meskipun belum terlalu merata dengan beberapa kecamatan saja yang memiliki TPS3R, ketiga melakukan kerjasama dengan NGO, kerjasama yang dilakukan seperti membuat kajian kebijakan terkait pengelolaan sampah rumah tangga, selain itu dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga DLH dapat segera menerapkan keterbaharuan dasar kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dalam bentuk Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada), membuat kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga di masyarakat dengan melibatkan RT/RW, serta memberikan fasilitas penunjang yang merata ke setiap Kecamatan, dan lebih meningkatkan laju informasi ke masyarakat melalui sosialisasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga.

2.Faktor Pendukung dan Kendala Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung

1. Terdapat beberapa faktor-faktor pendukung yaitu :

- a. Adanya Kelompok Pengelolaan Sampah

Adanya kelompok pengelolaan sampah rumah tangga yang peduli terhadap lingkungan merupakan faktor yang dapat mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga. Pionir ini menjadi pemantik dan peduli terhadap lingkungan akan, beberapa pionir ini tertarik untuk ikut serta dalam program-program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, serta lebih disiplin dalam melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, beberapa kelompok pendorong pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung melakukan inisiasi pembentukan bank sampah secara mandiri oleh masyarakat, dapat diambil contoh bank sampah lestari sejahterah serta bank sampah emak.id.

- b. Kerjasama Pemerintah Kot Bandar Lampung bersama Pihak Swasta Dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung Pemerintah melakukan kerjasama yang melibatkan PT. Wijaya Karya (WIKA) untuk melakukan pengelolaan sampah yang ada di TPA Bakung dan TPS yang ada di Kota Bandar Lampung, kerjasama bertujuan untuk pengolahan sampah yang nantinya akan didaur ulang menjadi briket, Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat menjalin kerjasama pula dengan komunitas yang bergerak dalam pengelolaan sampah rumah tangga, karena ada beberapa komunitas yang menjanjikan dan dapat diberdayakan lebih bila mendapat Perhatian Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2.Terdapat beberapa kendala-kendala yaitu :

- a. Kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah Pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh DLH belum masif ke masyarakat terkait pengelolaan sampah, hal ini berpengaruh terhadap informasi untuk masyarakat yang bertujuan memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga, untuk saat ini masih banyak masyarakat kota Bandar lampung yang belum mengetahui bagaimana melakukan pengelolaan sampah pada tingkat rumah

tangga, sehingga hanya membuang sampah begitu saja ke TPS tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu.

b. Sumberdaya yang belum optimal

Belum optimalnya aspek sumberdaya yang ada pada DLH Kota Bandar Lampung dari sisi kualitas dan kuantitas dapat dilihat dengan belum terdapatnya sumber daya manusia berupa tenaga ahli yang ada di TPS maupun TPS3R di Kota Bandar Lampung untuk memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga ke masyarakat. Serta pemerataan sumberdaya fasilitas penunjang dan anggaran dalam pengelolaan sampah rumah tangga menjadi satu kendala selain sumber daya manusia

c. Kurangnya komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung

Pemerintah dalam hal ini DLH selaku pelaksana dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung, dapat melakukan keterbaharuan peraturan yang mengatur terkait pengelolaan sampah rumah tangga melalui Kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) kedalam Peraturan daerah, dengan adanya keterbaharuan peraturan tersebut pemerintah dapat melibatkan pengelolaan sampah rumah tangga hingga ke tingkat Kecamatan serta RT/RW yang diharuskan terlibat dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga, dan belum diberlakukan sanksi bagi masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah rumah tangga, dan belum terdapat SOP pengelolaan sampah bagi masyarakat menjadi hal lain yang menunjukkan minimnya komitmen pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat segera menerapkan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam Peraturan Daerah, untuk terciptanya keterbaharuan peraturan dan

landasan hukum sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) pengelolaan sampah rumah tangga.

- b. Pembuatan kegiatan pengelolaan sampah secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari tingkat Kecamatan hingga RT/RW dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
- c. Pemerataan fasilitas penunjang serta tenaga ahli dalam pengelolaan sampah rumah tangga di tiap-tiap Kecamatan Kota Bandar Lampung.
- d. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dapat melakukan kerjasama dengan komunitas pengelolaan sampah rumah tangga yang ada, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat agar mulai melakukan pengelolaan sampah rumah tangga.
- e. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung aktif melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial untuk meningkatkan laju informasi pengelolaan sampah rumah tangga di masyarakat dan informasi terkait perusahaan atau komunitas yang menerima hasil pengelolaan sampah rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Books :

- Ahyar, H., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif SERI BUKU HASIL PENELITIAN View project Seri Buku Ajar View project*. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Damanhuri, E., Tri Padmi, & Penerbit ITB. (n.d.). *Pengelolaan sampah terpadu*.
- Dr. Eko Murdiyanto. (2022). *PENELITIAN KUALITATIF*.
- Dr.Nuryanti Mustari, S. I. M. S. (2015). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*.
- oleh Enri Damanhuri Tri Padmi, D. (2010). *PENGELOLAAN SAMPAH*.
- Perencanaan, T., Dan Evaluasi, I., Subianto, A., & Si, M. (n.d.). *KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Pramono Sos, J. S. (2020). *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Puspawati, C. (2019). *Pengolahan Sampah*.
- Teori implementasi kebijakan*. (n.d.).

Journals :

- Angela Aurelia Djamilgo. (2023). *PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TOMOHON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA*. Vol.XI/.
- Citra Lestari, S., Halimatussadiyah, A., Ekonomi, M. P., Publik, K., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Indonesia, U. (n.d.). *Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional*:

- Analisis Pendorong Food Waste di Tingkat Rumah Tangga.*
<http://www.worldwatch.org/food-waste-and-recycling-china-growing-trend-1>
- Dermawan, D., Lahming, L., & S. Mandra, Moh. A. (2018). Kajian Strategi Pengelolaan Sampah. *UNM Environmental Journals*, 1(3), 86.
<https://doi.org/10.26858/uej.v1i3.8074>
- Fadila, N., Safitri, D. P., & Kurnianingsih, F. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.*
- Imelda, I., Yuliana, S., Apriani, D., & Andaiyani, S. (2020). Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan Metode Komposting di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 107–114. <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.19>
- Maryana, Y., Supena, C. C., & Suwarlan, E. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PANGANDARAN (Studi Analisis Di Kecamatan Pangandaran).*
- Mujahiddin, Tanjung, Y., & Saputra, S. (2021). Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Pematang Johar, Deli Serdang. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3).
<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4316>
- Nugraha, A., Sutjahjo, S. H., & Amin, A. A. (2018). ANALISIS PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI JAKARTA SELATAN. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(1), 7–14. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.7-14>
- Nurchahyo, E., & Ernawati, D. (n.d.). PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA MABULUGO, KABUPATEN BUTON. In *Jurnal*

<https://www.kajianpustaka.com/2017/03/pengertian-bentuk-dan-tahapan-kebijakan-publik.html>

Prasetia, A. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG*.

Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan, P., dan Kesehatan, G., Agnes Fitria Widiyanto, O., Catur Pratiwi, O., Yuniarno, S., Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, J., & Politik Fakultas Ilmu Budaya, J. (2017). *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers MODEL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BANYUMAS*.

Tentang, A. T., & Publik, K. (n.d.). *II. TINJAUAN PUSTAKA*.

Utami, B. D., Siswi Indrasti, N., & Dharmawan, A. H. (n.d.). *Pengelolaan Sampah Rumahtangga Berbasis Komunitas: Teladan dari Dua Komunitas di Sleman dan Jakarta Selatan*.

Wati, F. R., Rizqi, A., M. Iqbal, M. I., Langi, S. S., & Putri, D. N. (2021). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia. *PERSPEKTIF*, 10(1), 195–203. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4296>

Website :

[SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional \(menlhk.go.id\)](https://menlhk.go.id)

<https://cagakurip.com/pengolahan-sampah-di-singapura/#Pengangkutan>

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli.html>